

Tragedi Kemanusiaan Dalam Perang Amerika Serikat – Irak: Analisis Dampak Invasi Amerika Serikat Terhadap Irak Berdasarkan Hukum Internasional

Edward Benedictus Roring¹, Hera Aprillya Dwi Lestari², Kayla Fellicia Putri³, Cleo Patricia Joe⁴, Khaidar Abdan Syakuran⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

¹edwardbenedictus22@gmail.com, ²heralestari35@gmail.com, ³kayla.fellicia04@gmail.com,

⁴cleojo23@gmail.com, ⁵khaidarov51@gmail.com

***ABSTRACT;** In case studies regarding humanitarian tragedies resulting from international war, we sometimes encounter human rights violations in them. This also happened to the Iraq war which started in 2003 and ended in 2011 as well as a war which caused the United States to incur huge costs after the United States war invasion of Vietnam. Apart from spending huge amounts of money, the war between these two countries also took a lot of victims for the United States and Iraq, especially innocent children and women who died. This war also occurred without the blessing of the UN because it was considered to be based on political, security and economic motives. The economic benefits especially for the United States from winning this war had an impact on Iraq's oil supplies which changed hands to be controlled by the United States. Several news sources also said that the United States' invasion of Iraq was due to the United States assessing that Iraq had weapons of mass destruction (WMDs) and considering that the government regime in Iraq at that time under Saddam Husein's government was a threat to global security.*

***Keywords:** International War, Invasion, Weapons of Mass Destruction (WMDs)*

ABSTRAK; Pada studi kasus mengenai tragedi kemanusiaan akibat perang internasional, terkadang kita menemui pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia didalamnya. Hal itu juga terjadi pada perang Irak mulai tahun 2003 hingga 2011 sekaligus perang yang membuat Amerika Serikat mengeluarkan anggaran biaya yang sangat besar setelah invasi perang Amerika Serikat kepada Vietnam. Selain menghabiskan anggaran biaya yang sangat besar, perang antar dua negara ini juga memakan korban yang sangat banyak bagi pihak Amerika Serikat dan Irak terlebih banyak sekali korban meninggal yang dialami oleh anak-anak dan perempuan yang tidak berdosa. Perang ini

juga terjadi dengan tidak adanya restu dari PBB karena dinilai syarat akan motif-motif kepentingan politik, keamanan dan ekonomi. Keuntungan ekonomi khususnya bagi Amerika Serikat dengan memenangkan perang ini berdampak pada pasokan minyak Irak yang beralih tangan dikuasai oleh Amerika Serikat. Beberapa sumber berita juga mengatakan invasi Amerika Serikat pada Irak ini akibat pandangan terhadap Irak memiliki senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction, WMDs*) dan menganggap bahwa rezim pemerintahan di Irak saat itu dibawah pemerintahan Saddam Husein merupakan ancaman bagi keamanan global.

Kata Kunci: *Perang Internasional, Invasi, Weapons of Mass Destruction (WMDs)*

PENDAHULUAN

Dalam studi kasus tragedi umat manusia akibat konflik Internasional, terkadang kita menjumpai permasalahan konflik internal umat manusia yang berpengaruh besar pada dunia internasional. Hal ini juga terjadi selama perang Amerika Serikat dan Irak yaitu perang yang terjadi pada 2003 hingga 2011. Serangan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat atas Irak tentu mencerminkan adanya kampanye bersenjata terselubung yang dilakukan dalam rangka hubungan Internasional yang berujung pada tergulingnya penguasa Irak saat itu Saddam Husein, serta serangan yang menyebabkan Amerika mengalami kerugian finansial yang besar setelahnya. Selain menyoroti keperbedaan kekayaan yang signifikan antara kedua negara tersebut, kedua negara ini telah menciptakan banyak konflik bagi perbedaan yang signifikan antara Amerika Serikat dan Irak. Hal ini terutama berlaku pada konflik yang sering terjadi berakibat banyak sekali dijumpai kematian terhadap para wanita serta anak-anak tanpa dosa. Perang ini terjadi tanpa adanya persetujuan dari PBB karena disinyalir perang tersebut dimaknai sebagai kumpulan motif-motif kepentingan terkait politik, ekonomi, dan keamanan, khususnya Amerika Serikat yang dapat dikatakan memenangkan atas invasi tersebut berdampak atas perpindahan kekuasaan dalam penguasaan terhadap armada minyak Irak yang akhirnya dikuasai oleh Amerika Serikat. Dalam artikel media dan laporan-laporan dari berita juga menyatakan, bahwa invasi Amerika Serikat ke Irak disebabkan oleh keyakinan Amerika

Serikat bahwa senjata pemusnah massal Weapons of Mass Destruction (WMDs) yang dimiliki Irak dapat berdampak negatif bagi kelangsungan hidup warga dunia internasional serta telah diketahui bahwa kondisi pemerintahan Irak saat itu di bawah kepemimpinan Saddam Husein merupakan ancaman terhadap keamanan internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini menguraikan tentang metode dan pendekatan yang kualitatif. data yang digunakan kami ambil dalam format penjelasan mengenai konflik Amerika Serikat dan Irak yang berasal dari sumber-sumber media, diantaranya; web, artikel media online lokal dan nasional serta internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian dari data ilmiah yang berasal dari web, jurnal, buku dan artikel-artikel pemerintahan internasional dapat kami lihat bahwa keberlangsungan invasi Amerika Serikat atas Irak sebenarnya adalah sebuah invasi ilegal yang membuat PBB mengutuk keras dengan terjadinya invasi tersebut karena disini lain Amerika Serikat berpandangan bahwa invasinya berlandaskan pada keamanan dunia internasional sementara bukti bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum humaniter internasional di medan perang benar-benar terjadi dan membuat banyaknya korban jiwa pada masyarakat sipil. Invasi AS ke Irak dimotivasi oleh keinginan pengukuhan sebagai satu-satunya negara adidaya yang tak terkalahkan didunia. Sebelum menjadi kekuatan besar, kekuatan global lainnya mempunyai kapasitas yang dianggap sebagai lawan atau mampu menandingi maka akan dilemahkan. Dari sudut pandang Barat, Islam mempunyai kapasitas paling besar untuk menantang dan menggulingkan dominasi AS. Sehingga, dibawah kedok pemberantasan teroris, penegakan perdamaian internasional serta penggulingan Partai Baath yang diperintah oleh Saddam Husei yang otokratis dan tirani, Irak kemudian diinvasi AS. Amerika dan Israel mendapat keuntungan politik dan ekonomi yang besar dari kemenangan AS melawan Saddam Husein, karena dapat mempermudah rencana mereka untuk menaklukan serta mendominasi negara Arab dan

dunia. Dibalik pembenaran yang ditawarkan para pejabat kebijakan AS atas invasi ke Irak, terdapat tujuan didalamnya yang lebih terukur. Terdapat fakta mengenai konsekuensi dari invasi ke Irak yang sengaja dilalaikan. Lanskap politik global mengalami pergeseran yang dramatis. Konsekuensi yang meluas, menghasilkan lebih banyak konfrontasi yang meningkatkan situasi politik secara global, tidak hanya di Timur Tengah. Fungsi PBB semakin terdegradasi sehingga terjadi pergeseran kekuatan antara Timur dan Barat, serta kekuatan global baru yang berkuasa untuk mengendalikan AS. Timur Tengah mengalami peningkatan konsentrasi kekuatan global sehingga terjadi polarisasi kekuatan menjadi Barat dan Islam.¹ Namun pada kenyataannya, hal ini sudah terjadi akibat pengaruh Amerika di Timur Tengah yang meningkat. Kemenangan AS merupakan kemenangan Israel yang membawa pada dua kebenaran. Karena lebih mudah untuk mewujudkan tujuan yang telah lama dua negara tersebut rencanakan yaitu memfailitasi pembentukan negara Israel Raya. Perluasan pengaruh AS mempengaruhi ketercapaian kebebasan Israel untuk melakukan langkah politik yang bertujuan untuk menghambat perjuangan Palestina dan merusak kemampuan negara-negara Arab melakukan negosiasi pada tingkat politik. Banyak argumen dalam bidang ekonomi yang menyetujui hal tersebut bahwa insentif utama AS untuk menginvasi Irak yaitu keinginan memperoleh keuntungan besar dari cadangan minyak yang ada. Hal tersebut didasari kenyataan bahwa AS mempunyai kebutuhan energi minyak paling besar didunia. Konflik antara Euro dan Dolar merupakan kenyataan lain yang berpotensi memberikan dampak signifikan pada kelangsungan hidup ekonomi AS. Kesombongan Saddam Husein membuat AS marah dalam menggunakan euro saat ekonomi AS sedang runtuh, hal tersebut membuat negara lain mengikuti sehingga berdampak pada dolar AS. Kehancuran Irak sebagai sebuah negara merupakan fakta lain. Setelah kekalahan Irak dan kehilangan identitas sebagai komponen fundamental sebuah bangsa dari sebuah konflik. Kebenaran kedua yaitu sentimen agama yang dipicu oleh pertempuran sebagai validasi argumen Samuel P. Hunington membuat perbandingan antara budaya Islam dan Barat. Perang ini

¹ Zain, Azman Ridha, dan Hasan Muarif Ambarly. 2004. Realitas di balik konflik Amerika Serikat-Irak : analisis terhadap invasi AS ke Irak.

menjadi pembenaran atas benturan peradaban walaupun tidak ada pengakuan. Meskipun terjadi perdebatan, sejarah menunjukkan persaingan dan kebencian laten yang tertanam dalam diri umat Yahudi dan Kristen pada Islam menjadi dasar dari banyaknya konflik yang ada sehingga berdampak pada kemunduran erta kekalahan politik Islam pada Barat. Belum diketahui keyakinan agama maupun kekuatan hegemoni serta kekuasaan. Apapun alasan invasi AS ke Irak, benturan peradaban menjadi faktor dalam perjuangan antara kekuatan Islam dan Barat, pertarungan antara kedua negara dalam konflik AS dan Irak tidak berasal dari benturan peradaban. Sebaliknya, konflik tersebut membawa pada terbukanya perpecahan dan kesenjangan antara peradaban Islam serta Barat. Kenyataan tragis penderitaan rakyat Irak sehingga berefek jangka panjang dimasa mendatang sebagai hasil lain dari konflik negara tersebut. Dalam hal ini, telah terbukti bahwa AS melanggar HAM di Irak yang tidak dapat dihindari akibat konflik yang tidak dibenarkan tersebut. Fakta tragis yang muncul dari perang berkepanjangan di Irak merupakan penderitaan rakyatnya yang berdampak pada masa depan mereka. Telah terbukti bahwa AS telah melanggar HAM di Irak yang tidak terhindarkan mengingat kebrutalan dalam konflik tersebut. Fakta mengungkapkan bahwa AS memanfaatkan perang sebagai kesempatan memamerkan teknologi militernya sebagai satu-satunya kekuatan militer dunia. Dalam rangka mengembangkan strategi perang dimasa mendatang dilakukan melalui unjuk kekuatan dalam kemampuan militer. Faktanya yang terjadi adalah perang tersebut sampai pada perang media antara berbagai media massa internasional. Media terbukti mempunyai peran penting dalam mempengaruhi persepsi publik mengenai situasi konflik yang terjadi. Dua kutub media yang berselisih yaitu Barat dan Arab atau Islam yang tidak terjadi pada perang sebelumnya. Sudah dari sekian lama media barat mendominasi berita dan membuat opini global dari kebenaran atas konfrontasi serta perang AS dengan Irak.² AS menginvasi negara yang kaya akan minyak yaitu Irak pada tahun 2003 dalam upaya penangkapan Saddam Husein, sehingga menjadi pemicu konflik AS-Irak. Setelah memerangi ISIS dan menggulingkan Saddam Husein, invasi tersebut

² Britannica.(2023) perang irak 2003 - 2011.

berakhir pada Juli 2021. Dimana presiden AS, George W. Bush, membuat berita bohong bahwa Irak dipimpin Saddam Husein mempunyai senjata pemusnah massal yang kemudian terjadi invasi pada 20 Maret 2003. Baghdad diambil alih oleh Pasukan AS pada 9 April 2003. Tank milik AS menggulingkan patung Saddam Hussein yang dibantu rakyat Irak. Pada 1 Mei 2003, Bush mengatakan bahwa operasi tempur besar akan dihentikan kemudian AS mengakui pada 2 Oktober tidak ditemukannya WMD. Setelah 9 bulan dalam pelarian, pada 13 Desember Saddam Husein ditangkap tidak jauh dari kampung halamannya di Tikrit. Kemudian ia di eksekusi 3 tahun setelahnya. April 2004 menjadi bukti AS mulai dibalas oleh Irak melalui foto penyiksaan yang buruk pada warga Irak di penjara militer Abu Ghraib yang dikelola AS keseluruh media. Kemudian pada bulan Juli, pemerintahan sementara mengambil alih. Setelah hukuman mati pada 4 warga AS bulan maret, kota Fallujah sebagai kota Arab Sunni menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan. Pada November 2004, sebanyak 10.000 tentara AS dan 2.000 tentara Irak menyerang kota tersebut. Kemudian disusul ledakan sebuah kuil Syiah di Samarra pada Februari 2006 oleh esktremis Sunni terkait dengan Al Qaeda atau gelombang kekerasan sektarian yang mengakibatkan puluhan ribu orang tewas hingga 2008. George W. Bush mengumumkan pada Januari 2007 bahwa 30.000 tentara tambahan akan dikirim hingga totalnya menjadi 165.000 dan menyatakan hal tersebut diperlukan guna mendapatkan kembali otoritas nasional. Kemudian Obama pada tahun 2009 sebagai presiden baru melakukan penentangan invasi yang mengakibatkan mayoritas tentara AS ditarik dari Irak mulai Agustus 2010 hingga 18 Desember 2011. Sebanyak 100.000 warga sipil menjadi korban invasi AS di Irak, sementara 4.5000 tentara AS yang mati. Fallajur dan sebagian Ramadi direbut kembali oleh milisi ISIS. Dan Juni 2014 kota utara Mosul yang sebesar sepertiga Irak turut diambil. Terjadi pemborbardiran pada pos milisi dengan ancaman pada Kurditan Irak serta Kristen dan Yazidi. Pasukan Irak mengusir ISIS dari pusat kota Irak dibantu koalisi yang dipimpin AS, kemudian mendeklarasikan kemenangan pada Desember 2017. Iran sebagai musuh lama AS kembali meningkatkan pengaruh pada Irak sejak perang dengan membantu kelompok paramiliter Hashed Al

Shaabi dengan posisi penting dalam pengusiran ISIS.³ Sebagai protes pengeboman fatal pada faksi Hash, ribuan warga Irak menyerbu kedutaan besar AS di Baghdad pada 31 Desember 2019. Serangan pesawat tak berawak AS di Baghdad pada 3 Januari 2020 merenggut nyata komandan senior Hash yaitu Abu Mahdi Al Muhandis dan Jenderal Tinggi Iran, Qasem Soleimani. Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Irak sebagai pembalasan. Parlemen Irak menuntut agar pasukan AS menarik diri dari Irak. Presiden AS saat itu yaitu Donald Trump menyatakan pada Agustus 2020 bahwa pasukan AS menarik diri dari Irak walaupun tanpa pemberian jadwal spesifik. Kemudian september tentara diturunkan dari 5.200 menjadi 3.000. Operasi tempur kemudian berhenti pada Juli 2021, menurut Joe Biden Presiden AS saat itu pasukan akan tetap berada di Irak untuk membantu militer Irak dalam konfliknya melawan ISIS. Organisasi pro Iran menginginkan sekitar 2.500 tentara AS tersisa untuk segera meninggalkan Irak pada 31 Desember. Dengan pernyataan misi tempur koalisi akan berakhir pada 9 Desember 2021, dan pergeseran ke misi non-tempur akan selesai pada waktu yang sama⁴. Antara invasi pasukan AS ke Irak pada tahun 2003 hingga pertengahan 2011, sebanyak setengah juta orang meninggal dalam konflik tersebut. Sekelompok ahli dari Irak, Kanada dan AS memperkirakan sebanyak 461.000 orang tewas. Penghitungan tersebut dibuat berdasarkan jajak pendapat acak mulai Mei hingga Juli 2022 pada 2.000 rumah di 18 provinsi Irak. Iraq Body Count sebagai organisasi dengan basis di Inggris yang mendapatkan data bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah, kemudian mencatat melalui catatan rumah sakit dan kamar mayat hingga media, memperkirakan jumlah korban tewas lebih rendah yaitu 112.000 warga sipil, meskipun faktanya lembaga ini secara teratur menghitung jumlah korban tewas akibat perang. 4.487 tentara AS tewas sejak dimulainya Operasi Kebebasan Irak pada 19 Maret 2003. Secara keseluruhan, 3.492 orang tewas dan 32.000 terluka. 136 dari 179 tentara Inggris tewas selama perang. Serta

³ Iswara jaya Aditya. (2022) sejarah prang irak vs Amerika: awal invasi, tewasnya saddam Hussein, hingga pertempuran lawan ISIS.

⁴ BBC NEWS INDONESIA. (2013). Korban perang irak 460.000 jiwa lebih.

139 tentara dari negara koalisi turut tewas.⁵ Who memperkirakan rata rata harapan hidup bayi laki laki yang lahir pada tahun 2011 di irak adalah 65,5 tahun dan bayi perempuan berusia 72 tahun. 9 meskipun angka ini relatif sama dengan rata rata regional mediterania timur yaitu 67 orang untuk laki laki dan 70 orang untuk perempuan, angka yang sedikit lebih rendah ini disebabkan oleh tingginya angka kematian akibat invasi tahun 2003 dan konsekuensinya. Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah 63 dan angka kematian 1.000 kelahiran hidup adalah 38 pada tahun 2019, angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata regional di negara-negara Mediterania Timur, dimana rata-rata regional kematian ibu rasio per 100.000 kelahiran hidup sebesar 250 dan angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup sebesar 59,2%.⁶

Pembahasan

Laporan PBB Tentang Senjata Pemusnah Massal Irak

Pada tahun 1991, setelah perang teluk pertama yang berakhir dengan kekalahan iraq, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi 687. Resolusi ini menetapkan persyaratan gencatan senjata yang dilakukan oleh iraq dan mewajibkan Iraq untuk menghilangkan senjata pemusnah massal, seperti senjata kimia, biologi, dan nuklir. Untuk memverifikasi kebenaran hal tersebut, Resolusi 687 memerintahkan pembentukan United Nations Special Commition (UNSCOM) yang bertugas sebagai inspektor senjata PBB di Iraq. Awalnya pada 1992-1993, Iraq cukup kooperatif dengan inspectors PBB ini dengan membiarkan mereka melakukan inspeksi lokasi-lokasi di Iraq. Namun, kerjasama ini mulai memburuk. Iraq sering menghalangi dan menunda akses inspektor ke beberapa lokasi. Namun pada 1998, Saddam Hussein mengusir inspectors PBB pada Desember 1998, Saddam Hussein menuduh inspektor PBB sebagai mata-mata dan mengusir mereka dari Iraq. Penolakan ini terjadi setelah perselisihan soal akses tak terbatas yang diminta inspektor ke beberapa lokasi sensitif di Iraq.⁷ Penarikan inspektor PBB ini menyebabkan

⁵ BBC NEWS INDONESIA. (2013) perang irak dalam angka.

⁶ Rawaf S, Hassounah S, Dubois E, Abdalrahman B, Raheem. M, Jamil H, Majeed A. (2014) Kondisi kehidupan di Irak: 10 tahun setelah invasi pimpinan AS 107(5)

⁷ Council, Security. (2003). Thirteenth quarterly report of the Executive Chairman of the United Nations

komunitas internasional kehilangan akses untuk memantau program senjata Iraq secara langsung dan menimbulkan kekhawatiran yang besar terhadap masyarakat International. Pada 2002, AS menuduh Iraq masih menyembunyikan senjata pemusnah massal dan melanggar resolusi PBB. Mereka menuduh Iraq memiliki ribuan ton senjata kimia, puluhan rudal skud, dan berusaha membangun fasilitas nuklir. Iraq membantah tuduhan ini dan mengatakan senjata itu sudah dimusnahkan. Tidak ditemukan bukti konkrit oleh PBB mengenai tuduhan tersebut. Namun AS dan sekutunya tetap meyakini Irak menyembunyikan senjata itu. Mereka menggunakan isu ini untuk membenarkan invasi ke Irak pada 2003 untuk mencari dan menghancurkan senjata pemusnah massal tersebut. Setelah invasi 2003, tidak ditemukan bukti adanya senjata pemusnah massal di Iraq. Investigasi setelah perang menunjukkan tuduhan itu keliru atau dilebih-lebihkan. Pernyataan Colin Powel di PBB Tentang Bukti Senjata Pemusnah Massal Irak. Merujuk pada pidato yang disampaikan Colin Powell, pada 5 Februari 2003 sebagai Menteri Luar Negeri AS didepan Dewan Keamanan PBB. Menyatakan Data pendukung dimana Irak mempunyai senjata kimia, biologi dan nuklir yang dapat memusnahkan massal dalam pidatonya. Powell mengklaim Irak melanggar resolusi PBB dengan menyembunyikan senjata pemusnah massal tersebut dan terus berupaya memproduksi senjata terlarang itu. Sebagai bukti, Powell menunjukkan foto satelit, rekaman pembicaraan radio, dan kesaksian saksi mata yang dijadikan dasar tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Pidato tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan PBB agar memberikan mandat legal kepada Amerika Serikat serta para sekutu melakukan invasi pada Irak guna melucuti senjata pemusnah massal tersebut. Pernyataan Powell ini menjadi salah satu justifikasi utama bagi invasi Amerika ke Irak pada 2003 meskipun klaimnya kemudian terbukti tidak akurat dan salah.⁸ Council On Foreign Relations Tentang Tuduhan Terorisme Iraq Tuduhan keterlibatan Iraq dalam terorisme internasional, khususnya dengan jaringan Al Qaeda. Pemerintahan George W. Bush

Monitoring, Verification and Inspection Commission in accordance with paragraph 12 of Security Council resolution 1284 (1999)

⁸ Powel. L Colin, (2003). [U.S DEPARTMEN of STATE].

menuduh bahwa rezim Saddam Hussein di Iraq berhubungan dan mendukung Al Qaeda. Tuduhan ini menjadi salah satu alasan invasi Amerika ke Irak. Artikel CFR menganalisis klaim-klaim Amerika Serikat tersebut dan menyimpulkan bukti adanya hubungan Irak-Al Qaeda sebelum invasi 2003 sangat lemah dan tidak meyakinkan. CFR menyebut tidak ditemukan bukti signifikan Saddam Hussein terlibat dalam peristiwa 9/11 atau melakukan koordinasi dengan Al Qaeda untuk serangan terhadap AS. Tuduhan keterlibatan terorisme Irak ini dipakai AS untuk menggambarkan Irak sebagai ancaman terhadap keamanan dan mendapatkan dukungan invasi ke Irak pasca 9/11. Artikel CFR secara efektif meragukan dan mempertanyakan validitas tuduhan keterlibatan terorisme Irak yang diajukan pemerintahan Bush sebelum perang.⁹

Pelanggaran HAM Rezim Saddam Husein

Laporan Human Rights Watch Tentang Pelanggaran HAM Rezim Saddam Laporan ini mendokumentasikan pelanggaran HAM massal oleh rezim Saddam Hussein terhadap rakyat Irak. Termasuk penindasan oposisi politik, eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penghancuran desa-desa, dan pembantaian suku Kurdi. Laporan ini menjadi salah satu justifikasi AS untuk menggulingkan rezim Saddam demi alasan kemanusiaan.¹⁰ Melalui pengadilan hukum Irak pelanggaran HAM Rezim Saddam Husein terdapat beberapa hal, diantaranya: penghilang Etnis (Genosida) pelanggaran pasal 11 Undang-undang pengadilan pidana irak No.10 tahun 2005 yang melibatkan genosida atau pembantaian besa-besaran terhadap kelompok etnis atau agama tertentu. Pasal 12 undang-undang pengadilan pidana irak NO.10 tahun 2005 yang menyatakan bahwa pelaku dapat diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan jika mereka terlibat dalam serangan melawan penduduk sipil atau melakukan pembantaian secara sistematis, penggunaan senjata kimia di Halabja: Halabja, sebuah kota di kurdistan irak, mengalami serangan gas beracun pada tahun 1988. Serangan ini adalah bagian dari kampanye (Anfal) yang dipimpin oleh rezim saddam hussein. Penggunaan senjata kimia seperti ini dapat dianggap melanggar hukum

⁹ Council on Foreign Relations. (2005). IRAQ: Iraqi Ties Terrorism. Council on Foreign Relations.

¹⁰ Zumach Andreas, (2010) Situasi HAM di Irak belum berubah.

perang dan konversi internasional terkait.¹¹ Rezim Saddam Husein dikatakan melanggar *Pasal 37 ayat 1 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949* dan berkaitan dengan *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I)* yang mengatur adanya pelarangan membunuh, melukai atau menangkap musuh dan melakukan pengkhianatan. Tindakan yang mendapatkan kepercayaan dari pihak lain untuk meyakinkan bahwa mereka berhak untuk, atau wajib memberikan, perlindungan berdasarkan aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, dengan maksud untuk mengkhianati kepercayaan tersebut, merupakan tindakan pengkhianatan. Tindakan berikut adalah contoh pengkhianatan: (a) berpura-pura berniat untuk berunding di bawah bendera gencatan senjata atau menyerah; (b) berpura-pura tidak mampu karena luka atau penyakit; (c) berpura-pura memiliki status sipil dan non-tempur; dan (d) berpura-pura mendapatkan status dilindungi dengan menggunakan tanda, lambang atau seragam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau negara netral atau negara lain yang bukan pihak dalam konflik.

Pasal 38, ayat 1, Protokol I

Dilarang juga menyalahgunakan dengan sengaja dalam konflik bersenjata lambang, tanda atau isyarat pelindung lainnya yang diakui secara internasional, termasuk bendera gencatan senjata, dan lambang pelindung kekayaan budaya.

Pasal 44, ayat 3, Protokol I

Untuk meningkatkan perlindungan penduduk sipil dari dampak permusuhan, kombatan wajib membedakan dirinya dari penduduk sipil ketika mereka sedang melakukan serangan atau dalam operasi militer sebagai persiapan serangan. Namun demikian, dengan mengakui bahwa terdapat situasi-situasi dalam konflik bersenjata dimana, karena sifat permusuhannya, seorang kombatan bersenjata tidak dapat membedakan dirinya, ia harus mempertahankan statusnya sebagai kombatan, dengan ketentuan bahwa, dalam situasi tersebut, ia membawa senjatanya secara terbuka: (a) pada

¹¹ Faizan Lutfan, (2023) Kenapa Saddam Hussein dihukum mati? ternyata ini penyebabnya.

setiap keterlibatan militer, dan (b) pada saat ia terlihat oleh musuh ketika ia sedang terlibat dalam penempatan militer sebelum melancarkan serangan yang mana ia akan ikut serta.

Pasal 51, ayat 7, Protokol I

Kehadiran atau pergerakan penduduk sipil atau individu warga sipil tidak boleh digunakan untuk membuat titik atau wilayah tertentu kebal dari operasi militer, khususnya dalam upaya untuk melindungi sasaran militer dari serangan atau untuk melindungi, mendukung atau menghalangi operasi militer. Pihak-pihak yang berkonflik tidak boleh mengarahkan pergerakan penduduk sipil atau individu sipil untuk mencoba melindungi sasaran militer dari serangan atau untuk melindungi operasi militer.¹²

Motif Invasi Amerika Serikat atas Irak

Middle East Policy Council Tentang Minyak Sebagai Motivasi Invasi Ke Irak Artikel dari Middle East Policy Council Tentang Minyak Sebagai Motivasi Invasi Ke Iraq berpendapat bahwa minyak merupakan motivasi dominan bagi AS menginvasi Irak. Irak mempunyai cadangan minyak paling besar nomor dua didunia. AS ingin mengamankan akses ke minyak tersebut. Penulis menyebut invasi Irak sebagai contoh imperialisme minyak, bukan semata demokrasi atau HAM. Buku Plan Of Attack Karya Bob Woodward Yang Menyebut Dendam Bush Pada Saddam Buku karya Bob Woodward ini mengungkap dendam pribadi Bush terhadap Saddam sejak Saddam berusaha membunuh ayahnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memotivasi Bush untuk menginvasi Irak dan menggulingkan Saddam. Sedangkan pernyataan Bush yang menghubungkan Irak dengan 9/11, meskipun klaimnya tidak berdasar, turut memainkan peran dalam meyakinkan publik AS tentang invasi ke Irak pasca 9/11. Pelanggaran hak asasi manusia di bawah kediktatoran Saddam Hussein adalah salah satu penyebab utama invasi pimpinan Amerika ke Irak. Selanjutnya, pemerintah kebutuhan pemerintah Irak perlu menyerahkan kepada HAM PBB untuk diajukan. Hadir dalam agenda pertemuan pada Selasa, 16 Februari, sebagai bagian dari tinjauan rutin Dewan HAM PBB terhadap

¹² Satterlee Carrie, (2003) pelanggaran konvensi jenewa yang dilakukan saddam husein.

kondisi HAM pada 192 negara sebagai anggota PBB. Sejak invasi pertama di Irak pada 2003, PBB memeriksa kondisi HAM dalam negara tersebut. Pembunuhan manusia di Irak telah menjadi sumber kontroversi dan kekhawatiran sejak invasi Amerika Serikat kontroversi tahun 2003. Dengan tindakan yang dilakukan oleh pemberontak, yaitu aliansi antara Amerika Serikat dan pemerintah Irak. Amerika Serikat saat ini sedang sedang mengkaji beberapa standar perilaku bisnis internal dan internasional yang dijalankan oleh pemasok dan kontraktor independennya. Menelaah bagaimana masyarakat melanggar HAM. Beberapa tahun kedepan kemungkinan besar akan terjadi tuntutan atas kejahatan perang di pengadilan dan hutang pidana atas berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pemberontak. Pada akhir Februari tahun 2009, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menerbitkan laporan mengenai keadaan HAM di Irak, dengan mengutip data tahun sebelumnya (2008). Saat itu, baik Amerika Serikat maupun Inggris memberikan jaminan mengenai konflik yang sedang berlangsung di Irak, karena perluasan penggunaan senjata pembunuh serta pelanggaran HAM oleh Saddam Hussein si dictator Irak. Kondisi HAM di Irak belum membaik setelah krisis selama setahun. Ini adalah pernyataan oleh Komite Hak Asasi Manusia Filipina, Amnesty International Komite Hak Asasi Manusiadan organisasi hak asasi manusia independen lainnya. Keberangkatan tersebut menjadi batu loncatan bagi proses pemeriksaan di Jenewa. Fokus utama laporan ini adalah dimulainya kembali mati hukuman. Belanda terbesar untuk PBB Boudewijn Van Eenennaam menunjukkan bentuk hukuman tersebut yaitu, tingginya kasus hukuman mati bahkan bagi pelanggaran ringan membuat Belanda perihatin. Dukungan bagi Irak untuk memberlakukan kembali moratorium hukuman mati sebelum dihapus sama sekali. Terkait dengan hak asasi manusia, diplomat dari negara Barat turut menekankan praktik misi diplomatik di Irak, peran polisi serta pasukan keamanan lainnya, dan kondisi non-manusiawi di provinsi-provinsi di wilayah tersebut Organisasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa di Irak, masih terdapat beberapa organisasi berbasis rahasia, seperti di Abu Ghraib, di mana orang dieksekusi tanpa melalui proses hukum dan kemudian mengalami euthanasia. Selain itu, diskriminasi gender, kesenjangan, dan goyahnya penerapan hukum dalam proses persidangan juga tidak luput dari kritik. Menteri Hak

Asasi Manusia Irak Wijdan Salim menanggapi kritik terhadap negaranya. Republik Irak menyadari kekhawatiran internasional, khususnya mengenai isu hukuman mati di Irak. Hal positif yang dicatat oleh media mengenai Irak adalah bahwa kerja sama dengan PBB terjadi peningkatan pada 3 tahun terakhir. “Irak juga sudah membaik,” dan telah menandatangani beberapa perjanjian hak asasi manusia PBB. Komisaris Tinggi PBB mengatakan pada laporan bahwa ia berharap Irak akan memperbaiki bukan hanya HAM saat ini, namun juga situasi sejak masa Saddam Hussein. PBB mendokumentasikan hampir 17.000 kasus warga Irak yang diculik atau ditahan tanpa alasan jelas mulai 1979 hingga pertengahan 2009. PBB meminta pemerintah Baghdad untuk menjelaskan kejadian pada 17.000 orang selama tiga tahun. Hanya 130 kasus telah diselesaikan sejauh ini. Fakta tragis yang muncul dari perang berkepanjangan di Irak adalah penderitaan rakyat Irak yang berdampak pada masa depan mereka. Telah terbukti bahwa AS melanggar HAM di Irak sebagai konsekuensi alami dari konflik yang tidak berlandaskan kemanusiaan.¹³

Kekalahan Irak dan Wafatnya Saddam Husein

Setelah kekalahan Irak yang menentukan dan penangkapan pemimpinnya yaitu Saddam Hussein, pengadilan memutuskan pada tanggal 5 November 2006 guna eksekusi Hussein. Pada tanggal 26 Desember 2006, pengadilan banding menguatkan putusan tersebut. Pada 30 Desember 2006, eksekusi hukuman dilaksanakan. Penjatuhan hukuman bersalah serta hukuman mati pada tahun 2006 atas kematian 148.000 warga Syiah pada awal 1980-an. Diklaim bahwa selama konflik, Saddam Hussein menggunakan persenjataan terlarang. Irak dikenai sanksi ekonomi PBB dan dituduh memproduksi senjata pemusnah masal sepanjang 1990-an yang memicu protes global serta mendapat kritik dari beragam sumber. Terdapat beberapa tuduhan hingga invasi AS pada bulan Maret 2003. Pada tanggal 13 Desember 2003, pemimpin Irak Saddam Hussein ditahan setelah beberapa bulan melarikan diri. Hakim Ketua Rauf Rasheed kemudian

¹³ Zain ridha Azman, (2004) Realitas di balik konflik Amerika Serikat-Irak : analisis terhadap invasi As ke Irak.

menjatuhkan hukuman mati kepada Saddam pada tanggal 5 November 2006 atas seluruh tindakannya yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan sebagai pemimpin Irak. Ia dijatuhi hukuman saat berusia 28 tahun dinyatakan bersalah pada 30 Desember 2006, dan diperintahkan untuk digantung di Bekas Intelijen Militer di Baghdad. Bersamaan dengan saudara tiri Saddam, Barzan Ibrahim dan Awad Hamed al-Bandar, ketua Pengadilan Revolusi Irak pada 1982 turut dinyatakan bersalah dengan tuduhan serupa dengan hukuman gantung. Syahadat, shalawat nabi serta takbir diucapkan oleh Saddam Hussein saat proses hukuman mati yang diikuti orang yang menyaksikan. Sami al-Askari, penasihat perdana Menteri Irak, yang ada saat eksekusi berlangsung menjelaskan bahwa Saddam Hussein tampak tenang menghadapi kematiannya. Sebelum dieksekusi, ia mengajukan satu permintaan terakhir yaitu ia ingin ditemani oleh Al Qur'an saat berada digantungan. Kemudian Saddam Hussein digantung pada 30 Desember 2006. Ia mengatakan dalam kata terakhirnya yaitu "Bangsa ini akan menang, Allah Maha Besar, dan Palestina adalah Arab" yang dikutip Associated Press. Kemudian tanggal 31 Desember 2006 ia dimakamkan di Al Awja yaitu tanah kelahirannya. Menurut laman history, PBB memberlakukan Resolusi 1441 pada November 2002 serta memperingatkan bahwa Irak akan mendapatkan konsekuensi dari pelanggaran yang terus menerus dari kewajibannya. Resolusi tersebut memojokkan Irak melanggar resolusi Dewan Keamanan mengenai pelucutan senjata non-konvensional. AS serta sekutunya melancarkan serangan secara cepat menggulingkan pemerintahan Ba'athis Saddam Hussein di Irak karena tidak patuh pada peringatan tersebut. Saddam berhasil melarikan diri dan hidup dalam persembunyiannya sebelum akhirnya ditangkap dan dipenjara, sementara pemerintah yang terpilih secara demokratis pertama dalam sejarah Irak mengadilinya atas kejahatan perang. Saddam Hussein divonis bersalah atas kejahatan kemanusiaan pada 5 November 2006 kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Awad Hamed al-Bandar, ketua Pengadilan Revolusi Irak tahun 1982, dan Barzan Ibrahim, saudara tiri Saddam, divonis bersalah dengan tuduhan serupa. Meskipun tuduhan tersebut ditentang oleh

Mahkamah Agung Irak yang pada akhirnya menguatkan vonis tersebut.¹⁴ Masyarakat dunia melihat pemerintahan Saddam sebagai pemerintahan yang otokratis, namun berakhir pada 30 Desember saat ia digantung.

Pelanggaran Hukum Internasional (Hukum Humaniter Internasional) Invasi Amerika Serikat atas Irak

Invasi ke Irak pada tahun 2003 merupakan pelanggaran hukum Internasional, demikian temuan penyelidikan independen di Belanda. Amnesty internasional mendokumentasi keterlibatan pasukan AS dalam pelanggaran yang merajalela, seperti serangan acak yang menyebabkan korban sipil serta luka-luka, penahanan serampangan, penghilangan paksa, penyiksaan serta perlakuan kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat lainnya.¹⁵ Para mantan tahanan secara kredibel telah menuduh adanya serangkaian pelanggaran dipusat-pusat penahanan, termasuk pelanggaran tidur, pemaksaan telanjang, perampasan makanan dan air yang cukup, eksekusi palsu, dan ancaman pemerkosaan. Kuwait diserang oleh Irak pada 2 Agustus 1990. Serangan mendadak oleh Irak mendorong pemerintah AS dan lainnya untuk merespons yang bertujuan guna mempromosikan perdamaian serta keamanan seluruh dunia. Mayoritas negara merespons yaitu negara yang bekerjasama dengan Kuwait khawatir dengan kepentingan mereka yang terganggu apabila Irak menduduki Kuwait. Selain itu, Kuwait kehilangan kedaulatannya sebagai akibat dari serangan Irak pada tahun 2003, Irak melaksanakan 129 hukuman mati. Irak mulai menduduki peringkat pertama di antara negara-negara yang paling sering melakukan hukuman mati pada saat itu. Menurut penelitian Amnesty International, militer AS dan Inggris melanggar hak asasi manusia selain pasukan keamanan yang menerapkan hukuman mati. Meskipun tentara tempur AS telah ditarik pada akhir tahun 2011, banyak pelanggaran yang masih belum diselidiki. Irak sekarang memiliki otonomi politik yang lebih besar. Tetapi ada kerusakan dalam penegakan hukum. Hak-hak dasar warga negara masih terabaikan. Seruan Amnesty

¹⁴ Indmas Muhammad, (2023) kisah kematian Saddam Hussein yang minta Al-quran di tiang gantungan dan ucapan terakhir saat eksekusi mati.

¹⁵ Hirsch Afua, (2010) invasi Irak melanggar hukum Internasional, demikian temuan penyelidikan Belanda.

International untuk mengakhiri penyiksaan sangat penting. Tahanan juga tidak boleh ditahan dalam isolasi selama berminggu-minggu tanpa akses ke keluarga atau pengacara mereka. Saat pihak yang terlibat tidak mampu mencapai kedamaian, salah satu pilihannya yaitu konflik bersenjata atau perang seperti yang terjadi antara Irak dan AS. Diketahui bahwa AS menggunakan senjata kimia termasuk depleted uranium (DU), yaitu senjata dengan senyawa uranium dengan tingkat isotop yang lebih rendah atau dikenal sebagai senjata kimia DU. Yang menjadi permasalahan yaitu senjata tersebut tidak disebutkan dalam Konvensi Senjata Kimia (KSK), sehingga tidak diketahui bagaimana status hukum senjata kimia DU. Pasal 1 ayat 1 poin (b) KSK mengklasifikasikan depleted uranium (DU) sebagai senjata beracun, dan pasal 1 Protokol III KSK mengklasifikasikan DU sebagai senjata pembakar. Selain itu, Pasal 35 ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 secara tegas melarang penggunaan senjata yang dapat menyebabkan cedera yang berlebihan. Peraturan ini tidak secara khusus mengatur istilah "senjata kimia uranium yang sudah habis".¹⁶ Sementara itu, AS dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan karena kematian yang banyak terjadi pada warga sipil bukan kerusakan infrastruktur yang seharusnya dilindungi oleh hukum humaniter internasional.¹⁷ Selain itu perilaku pelanggaran Hukum Humaniter dari banyaknya tawanan perang Irak yang ditahan AS selama invasi pada 2003 diperlakukan dengan buruk. Sementara itu, perjanjian internasional telah mengatur aspek tertentu dalam hukum internasional mengenai perlakuan terhadap tawanan perang. Sehingga, sangat penting guna penekanan perlindungan tawanan perang sesuai hukum internasional serta meminta pertanggungjawaban AS dan pasukannya atas tindakan yang dilakukan.

Pasca Invasi Amerika Serikat atas Irak

¹⁶ Rumanda, Fahmi Islam, Soekotjo Hardiwinoto, dan Joko Setiyono. (2016). Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (Depleted Uranium) Pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat Versus Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.

¹⁷ Kusuma Dewi, Mira Nila. (2016). TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK. Universitas Indonesia Timur Makassar.

Situasi pasca invasi AS yang dihadapi rakyat Irak secara bertahap menciptakan masyarakat yang jauh dari aman dan tenteram seperti sebelumnya. Meluasnya perang saudara antara kelompok Sunni dan Syiah di Irak merupakan salah satu perkembangan masyarakat yang dikatakan sebagai akibat dari invasi AS ke negara tersebut. Eksekusi pemimpin spiritual Syiah Irak, Abdul Majid al-Khui, putra bungsu Ayatollah al-Khui, yang dianggap oleh para pengikutnya sebagai tokoh terpenting, telah menunjukkan adanya perang saudara atau persaingan antara pihak Sunni dan Syiah.¹⁸ Setelah invasi AS, Irak kehilangan keamanannya sehingga menyebabkan munculnya terorisme. Konflik dan pembomaran sering dilaporkan dalam berita yang terbukti dengan serangan teroris pada 3 September 2013 yang menewaskan sepuluh orang tak berdosa dibagian barat Baghdad. Rakyat Irak mengalami kekacauan, penurunan ekonomi dan kualitas hidup sehingga tidak stabil dibandingkan sebelum serangan tersebut. Moral masyarakat Irak yang menurun menjadi penyebab kekacauan serta memaksa mereka untuk melakukan hal yang seharusnya tidak terjadi, seperti mencuri dan berkelahi satu sama lain untuk bertahan hidup demi pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin langka akibat konflik yang tak kunjung usai.

Konspirasi Pasca Invasi Irak

Konflik Irak tidak seperti konflik lainnya, perang ini merupakan perpaduan rumit antara campur tangan asing serta elemen internal Irak. Individu yang terlibat mewakili identitas kelompok yang bersifat etnis, politik, regional dan agama didalamnya. Sementara itu, AS serta sekutunya berdampak pada dunia. Mustahil untuk memahami konflik Irak tanpa mengakui perpecahan yang parah dalam masyarakat berdasarkan ras, ideologi serta agama. Irak terpecah antara kelompok Sunni dan Syiah, serta antara filosofi Islamis, sosialis, pan-Arab dan pan-Islamis yang berbeda. Suku Kurdi, Arab dan Turkmenistan merupakan bagian dari negara ini.¹⁹ Memahami perang Irak tidak dapat didekati hanya melalui lensa teori konflik makro, terutama yang berkaitan dengan

¹⁸ Diana Puspita, Iskandar Syah, Syaiful M. (2013). IRAK PASCA INVASI AMERIKA SERIKAT.

¹⁹ UMY Hubungan Internasional. (2010) konflik etnis dalam masa transisi demokrasi di irak.

interaksi kelompok karena fragmentasi masyarakat. Menurut El Fatih A. Abdel Salam, kelompok terdiri dari individu yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok berbeda dan melihat satu sama lain sebagai saingan maupun anggota kelompok luar. Individu tersebut dikategorikan kedalam kelompok berdasarkan keyakinan politik, ras, etnik, agama dan faktor lainnya. Ketika terdapat persaingan dan perebutan sumber daya serta kekuasaan diantara kelompok tersebut maka konflik akan muncul. Tidak mungkin untuk memisahkan dorongan psikologis bagi manusia untuk membentuk sekutu dan lawan dari pembentukan kelompok sosial. Manusia dapat mengembangkan rasa identifikasi kelompok melalui dua proses yang berbeda: baik melalui sifat bawaan seperti ras atau etnis, atau melalui pengelompokan sosial seperti konglomerat, serikat buruh, atau komunitas petani. Ada dikotomi baik dan buruk ketika identifikasi kelompok terbentuk. Kita terus-menerus mengasosiasikan hal-hal positif dengan kelompok kita (ingroup) dan hal-hal yang tidak menguntungkan dengan dunia luar. Kontradiksi ini memunculkan rasa kita versus mereka. Para ahli yang mempelajari konflik tidak sepakat mengenai pentingnya peran etnisitas dalam konflik. Mengenai fungsi etnisitas, ada tiga aliran pemikiran: aliran objektivis berpendapat bahwa konflik adalah akibat langsung dari sistem politik dan ekonomi yang objektif. Kedua, budaya yang secara langsung menciptakan konflik atau memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan struktur ekonomi politik global saat ini dihasilkan oleh pandangan primal dan struktur produksi historis yang obyektif dan relatif stabil. Ketiga, perspektif instrumentalis berpendapat bahwa politik dan perilaku, bukan struktur objektif, yang menciptakan sistem yang mengarah pada konflik. Para politisi memobilisasi penduduk dengan kedok kepentingan suku untuk memajukan agenda sendiri. Mobilisasi suku terkait seringkali menyebabkan konflik antar suku yang tidak mempunyai kepentingan yang sama.

Di Irak, demokrasi yang seharusnya membawa perdamaian ternyata ditemui dengan perlawanan. Dengan meningkatnya tingkat kekerasan, semakin kecil peluang bagi Irak untuk bebas dari kekerasan setelah Saddam Hussein jatuh.

KESIMPULAN

Rakyat Irak tampaknya masih belum sepenuhnya menerima pembentukan pemerintahan baru di negara mereka oleh Amerika Serikat. Strategi militer Amerika Serikat dalam menempatkan pasukan di wilayah Irak membantu memastikan bahwa kawasan Timur Tengah dapat tetap terkendali dan tidak menjadi ancaman bagi status perdamaian dunia. Kekuatan Amerika Serikat sering digunakan sebagai tolok ukur bagi negara-negara Timur Tengah, terutama Iran, yang secara historis merupakan ancaman militer bagi AS. Selain itu, masih banyak daerah yang kaya dengan minyak disekitar Irak tetapi belum diketahui oleh pemerintah Saddam Husein. Maknanya, masih terdapat banyak ladang minyak yang berpotensi untuk dieksploitasi oleh Amerika Serikat sembari mempertahankan kendali atas Irak. Hal ini membuat penghancuran Irak dan pembentukan pemerintahan baru dengan perspektif barat dimana AS mengakibatkan warga Irak seringkali tidak puas, serta memberontak terhadap pemerintahan baru yang dianggap gagal mengubah Irak menjadi negara demokratis yang diinginkan sebagian besar penentang Saddam Hussein. Setelah itu, banyak yang menyesali penggulingan rezim Saddam Husein yang dianggap telah membawa kemakmuran finansial ke negara tersebut tetapi tidak menerapkan demokrasi dan HAM yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pemberontakan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar, terutama saat tahun awal setelah invasi AS ke Irak. Pemberontakan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan hukum internasional karena menurut para ahli analisis hukum internasional, AS melakukan kejahatan perang terkait dengan penerapan hukum humaniter internasional yang menjelaskan tentang mekanisme HAM guna memberi perlindungan saat terjadi konflik bersenjata yang tidak terbatas pada masyarakat internasional serta menyasar masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran, namun justru menjadi korban kejahatan perang di Irak.²⁰ PBB merupakan organisasi internasional dengan reputasi sebagai badan yang paling berwenang dalam menangani kasus pelanggaran hukum maupun perselisihan di arena internasional

²⁰ Ivan Pranadita Luga. 2023. ANALISIS TERHADAP INVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK DARI SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL. Dikutip Pukul 13:42

sehubungan dengan pelanggaran tersebut serta kritik yang meluas pada invasi tersebut. Namun, mengingat ketidaktegangan PBB pada invasi AS ke Irak memberikan dampak buruk pada kelangsungan eksistensi PBB sebagai organisasi perdamaian dunia. Serta menguatkan anggapan bahwa PBB tidak otonom, melainkan produk dari dominasi negara adikuasa yaitu AS dengan memperoleh kekuasaan dari keanggotaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Britannica. (2023) Perang Irak 2003 - 2011.
- BBC NEWS INDONESIA. (2013). Korban perang irak 460.000 jiwa lebih.
- BBC NEWS INDONESIA. (2013) perang irak dalam angka.
- Council, Security. 2003. Thirteenth quarterly report of the Executive Chairman of the United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission in accordance with paragraph 12 of Security Council resolution 1284 (1999)
- Council on Foreign Relations. (2005). IRAQ: Iraqi Ties to Terrorism. Council on Foreign Relations.
- Diana Puspita, Iskandar Syah, Syaiful M. (2013). IRAK PASCA INVASI AMERIKA SERIKAT.
- Faizan Lutfan, (2023) Kenapa Saddam Hussein dihukum mati? ternyata ini penyebabnya.
- Hirsch Afua, (2010) invasi irak melanggar hukum Internasional, demikian temuan penyelidikan Belanda.
- Indmas Muhammad, (2023) kisah kematian Sddam Hussein yang minta Al-quran di tiang gantungan dan ucapan terakhir saat eksekusi mati.
- Ivan Pranadita Luga. 2023. ANALISIS TERHADAP INVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK DARI SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL
- Iswara jaya Aditya. (2022) sejarah prang irak vs Amerika: awal invasi, tewasnya saddam Hussein, hingga pertempuran lawan ISIS.
- Powel. L Colin, 2003. [U.S DEPARTMEN of STATE].
- Kusuma Dewi, Mira Nila. (2016). TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK. Universitas Indonesia Timur Makassar.

Rawaf S, Hassounah S, Dubois E, Abdalrahman B, Raheem. M, Jamil H, Majeed A. (2014) Kondisi kehidupan di Irak: 10 tahun setelah invasi pimpinan AS 107(5)

Rumanda, Fahmi Islam, Soekotjo Hardiwinoto, dan Joko Setiyono. (2016). Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (Depleted Uranium) Pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat Versus Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.

Satterlee Carrie, (2003) pelanggaran konvensi jenewa yang dilakukan saddam husein.

UMY Hubungan Internasional. (2010) konflik etnis dalam masa transisi demokrasi di irak.

Zain ridha Azman, (2004) Realitas di balik konflik Amerika Serikat-Irak : analisis terhadap invasi As ke Irak.

Zumach Andreas, (2010) Situasi HAM di Irak belum berubah.

Zain, Azman Ridha, dan Hasan Muarif Ambary. 2004. Realitas di balik konflik Amerika Serikat-Irak: analisis terhadap invasi AS ke Irak.